

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kondisi Indonesia pada masa sekarang sangat berkembang dari masa ke masa, sebuah kemajuan yang signifikan ditunjukkan oleh Pemerintah daerah hingga Pemerintah pusat dalam mengelola tata kelola Pemerintahan. Indonesia memang bisa terbilang cukup tertinggal dari Negara-negara maju lainnya apabila dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi, bahkan bisa terbilang sudah cukup jauh tertinggal. Pada masa sekarang banyak Negara yang sudah mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi dalam proses kemajuan negaranya. Penggunaan teknologi informasi ini bisa dikatakan sangat membantu Pemerintah dalam mengimplementasikan seluruh programnya, bisa dari sektor pelayanan publik, administrasi, hingga laju perekonomian. Di Indonesia sendiri mengapa bisa tertinggal jauh dari Negara lain, hal ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi di Indonesia bergantung pada perkembangan manusia juga. Artinya adalah butuh penyesuaian tersendiri bagi sebuah teknologi untuk masuk ke Indonesia karena tidak semua masyarakat akan dapat menerima secara instan sebuah perkembangan yang signifikan.

Perubahan suatu sistem yang dilakukan oleh Pemerintah ini tentunya mempunyai dasar tersendiri. Salah satunya adalah pertumbuhan penduduk di suatu kota yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang diakibatkan dari pertumbuhan alamiah bahkan migrasi penduduk yang terjadi ini menjadikan suatu fenomena yang

harus di perhatikan, selain itu adanya perubahan karakteristik pada wilayah pertanian menjadi perkotaan atau bisa di sebut dengan proses urbanisasi.

Langkah antisipasi kepadatan penduduk yang nantinya akan melahirkan kawasan kumuh dan bisa menjadi masalah lingkungan hidup, pada akhirnya dibutuhkan upaya untuk penyelesaiannya<sup>1</sup>. Sehingga Pemerintah pada khususnya harus melakukan sebuah formulasi program khusus dalam hal pengembangan sebuah sistem baru yang nantinya akan berubah dari sistem sebelumnya. Hal ini sangat diperlukan karena semakin berkembangnya zaman tentu akan berbeda dengan zaman sebelumnya. Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi yang ada ada Pemerintah harus bisa untuk memanfaatkan pengetahuan teknologi. Pada masa sekarang Pemerintah Indonesia mulai menunjukkan bahwasannya sudah memulai menggunakan pengetahuan teknologi dalam hal tata kelola Pemerintahan. Pada era sekarang kabupaten/kota di Indonesia sedang menghadapi adaptasi dengan teknologi yang nantinya bisa digunakan untuk memudahkan dalam hal apapun yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Banyak manfaat yang bisa di dapatkan apabila menerapkan *Smart City*, namun kembali lagi harus melihat realita yang ada pada masyarakat apakah siap atau tidak untuk menuju perubahan. Seringkali jika terjadi suatu perubahan pada sebuah sistem tidak akan mudah untuk di terima langsung oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah guna membantuk masyarakat agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang telah

---

<sup>1</sup> Mustopa Haris, Riyanto Adi 2017. Implementasi Konsep *Smart City* Dalam Aspek Lingkungan Studi Kasus: Kota Cimahi. Jurnal Universitas Terbuka No 7297

dilakukan. Secara konsep yang berdasar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam program Gerakan Menuju 100 *Smart City* dijelaskan bahwa *Smart City* merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien.

Dalam penerapan konsep *Smart City* terdapat unsur-unsur yang perlu dikembangkan, salah satunya *Smart Government*. Konsep *Smart Government* menyangkut salah satu unsur penting perkotaan, yaitu instansi Pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar nantinya dapat diakses oleh yang berkepentingan dan dapat digunakan secara efektif dan efisien<sup>2</sup>. *Smart City* di Indonesia bisa dikatakan sebuah dobrakan baru yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang kemudian di turunkan ke Pemerintah Daerah guna di terapkan di daerah masing-masing.

Dalam hal ini Pemerintah daerah dapat terus untuk melakukan inovasi yang lebih luas lagi dalam hal penerapannya. Artinya inovasi ini tidak membatasi sebuah Pemerintah Daerah untuk mengembangkan segala program maupun program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah khususnya. Dalam jurnal yang berjudul Pelayanan Publik Berbasis Humanistik Untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa teori menurut Stephen Ezell salah satu keuntungan konsep *Smart City* adalah

---

<sup>2</sup> Kominfo:Gerakan Menuju 100 *Smart City* (15/11/2018).  
<https://aptika.kominfo.go.id/2018/11/gerakan-menuju-100-smart-city/> diakses pada 07 Oktober 2020.

dapat menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan, konsep *Smart City* juga membuat layanan *e-government* agar dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat<sup>3</sup>. Konsep *Smart City* ini juga dapat membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya, menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energy dan lingkungan. Konsep *Smart City* juga nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada konsep ini terdapat beberapa sektor yang didapat dalam mengembangkan *Smart City* banyak hal positif dari pengembangan *Smart City* tersebut. Pemerintah daerah seharusnya mulai untuk merangkak naik dalam menuju proses pencapaiannya<sup>4</sup>. Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwasannya *Smart City* tidak hanya tentang pembangunan teknologinya saja tetapi banyak aspek yang ada didalamnya yang dapat di kembangkan lagi. Diantaranya adalah pembentukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni didalam bidangnya masing-masing, sehingga pada penerapannya akan berjalan lancar. Kemudian adalah membuat layanan yang berbasis *Smart City* sehingga pada nantinya memudahkan masyarakat mengakses segala kebutuhannya yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah. Tentunya setiap Pemerintah Daerah tidak semua mampu untuk menerapkan *Smart City* secara mandiri, perlu adanya contoh dan pelatihan secara langsung dari

---

<sup>3</sup> Trimurti Ningtyas. 2017. "Pelayanan Publik Berbasis Humasistik Untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi". Dalam Ejournal Unitomo, 1(1), 1-12.

<sup>4</sup> Muhammad Khozin, Nur Faidati, Yogyakarta. Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (*Smart City*) Studi Kasus Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 03 Nomor 2 Hal 171-180.

Pemerintah Daerah lainnya yang telah berhasil menerapkan *Smart City* di daerahnya sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian yang terletak di Kabupaten Kendal, hal ini dilakukan oleh peneliti dikarenakan Kabupaten Kendal sendiri merupakan daerah yang secara letak geografis bersebelahan dengan Kota Semarang sebagai pusat Kota di Wilayah Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang sendiri juga sudah lebih dulu menerapkan *Smart City* dan terbilang sudah baik dalam hal penerapannya. Adapun penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal sebagai bentuk perluasan dari Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal lainnya adalah di dalam RPJMD 2016-2021 ini terdapat isu strategis Kabupaten Kendal yang salah satunya adalah Pelaksanaan Sistem *E-Government* dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kendal. Dijelaskan di dalamnya bahwa kemajuan teknologi informasi memberikan peluang untuk dimanfaatkan secara luas termasuk dalam Pemerintahan Kabupaten Kendal dalam hal peningkatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dijelaskan kembali bahwa dengan meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT (teknologi informasi) dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan memiliki tujuan agar terbentuk Pemerintah Kabupaten Kendal yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja Pemerintah. Proses penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal secara langsung diawali dengan bentuk kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan pada tahun 2018, hal ini di tandai

dengan adanya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dengan Pemerintah Kota Semarang. Bentuk kerjasama ini dilakukan karena Kota Semarang telah lebih dulu menerapkan *Smart City* dan bisa disimpulkan bahwa Kota Semarang telah berhasil dalam hal penerapan *Smart City*. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Kendal menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sangat baik dalam mengambil arah kerja sama antar daerah dengan Pemerintah Kota Semarang, langkah ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal serius guna menerapkan *Smart City* di Kabupaten Kendal.

Dengan mengandalkan sebuah teknologi informasi komunikasi menurut peneliti akan mempermudah keberlangsungan prosesnya. Dapat dilihat beberapa daerah yang masih menggunakan model/cara tradisional masih mengalami kendala bagi Pemerintah maupun masyarakatnya, hal ini dapat di contohkan dengan sistem pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara online, sehingga masyarakat tidak perlu repot untuk datang langsung ke kantor pajak. Contoh lainnya adalah ketika masyarakat membutuhkan sebuah informasi yang berkaitan dengan pemerintah bisa langsung mengakses secara online langsung. Pola seperti ini seharusnya dapat segera dihilangkan dan beranjak ke proses menyederhanakan sebuah cara sehingga dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Pengembangan *Smart City* ini memang di dorong untuk mendukung pelayanan publik sehingga dalam hal ini diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami sebuah kendala yang berarti. Penerapan *Smart City* di

Kabupaten Kendal telah terwujud dalam bentuk situs web yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Bentuk situs web yang telah di buat oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka pelaksanaan *Smart City* ini dapat diakses melalui link URL di pencarian Google (<https://smartcity.kendalkab.go.id>). Adapun didalam situs web tersebut terdapat beberapa pilihan menu yang tersaji dan beberapa info-info terkait dengan Kabupaten Kendal. Pada situs web yang dibuat didalamnya berisi berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Apabila situs ini dibuka pada halaman depan akan menemukan sebuah portal yang berisikan beberapa bagian yang diatur didalamnya. Untuk bagian pertama dapat dilihat adanya Lapor Kendal Via sosial media *Twitter*, *Facebook*, dan *Instagram*, lalu pada menu *Smart Governance* yang berisi bagian dari Pemerintah Kabupaten Kendal berupa Keuangan, Kepegawaian, Open data, Perizinan, pengaduan dll, lalu Panduan Pelayanan BPKB Polres Kendal, Pelayanan satu pintu Pengadilan Agama Kendal, dan Kawasan Industri Kendal. Selanjutnya menu *Smart Branding* yang berisi beberapa pengenalan Wisata yang berada di Kabupaten Kendal diantaranya; Wisata Goa Kiskendo, Pantai Cahaya, Wisata Alam Tlogo Mili Plantungan. Lalu menu *Smart Economy* yang berisi kegiatan tentang pengembangan ekonomi di Kabupaten Kendal seperti Kendal Expo UMKM Kabupaten Kendal. Selanjutnya menu *Smart Living*, pada bagian ini belum di temukan sejumlah update untuk pembaharuan isi aplikasi tersebut sehingga masih kosong isinya. Sama seperti dengan menu *Smart Living* pada bagian menu *Smart Society* dan menu *Smart Environment* juga ditemukan masih belum ada pembaharuan juga.

Dari penjelasan mengenai bagaimana bentuk penerapan *Smart City* yang telah di terapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kendal dalam bentuk situs web masih terdapat kelemahan. Hal inilah yang menjadikan apakah penerapan *Smart City* di Kabupaten Kendal sudah berjalan sesuai dengan rencana awal atau tidak. Bahkan penerapan *Smart City* di Kabupaten Kendal mulai di rumuskan pada tahun 2018, apabila kita menjurus pada RPJMD 2016-2021 seharusnya penerapan *Smart City* harus dilaksanakan pada awal-awal Tahun 2016-2017. Tentu Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki alasan mengapa penerapan *Smart City* baru terealisasikan pada tahun 2018 dan penerapan *Smart City* yang telah dilaksanakan bisa di bilang belum maksimal. Untuk saat ini pun situs web yang telah di buat (<https://smartcity.kendalkab.go.id>) tidak bisa di akses kembali. Bahkan sebelum tidak bisa di akses situs web yang telah di buat pun hanya bisa diakses sampai dengan halaman awal saja. Sajian menu yang ada hanya sebagai hiasan, tidak bisa di akses secara langsung sesuai dengan kebutuhan di tambah dengan tidak adanya pembaruan. Sehingga untuk info-info yang ada didalamnya tidak terupdate secara berkala. Hingga pada saat ini situs web yang telah dibuat yaitu melalui (<https://smartcity.kendalkab.go.id>) sudah tidak dapat diakses, melainkan pada saat ini pemerintah Kabupaten Kendal menggunakan situs web yang baru yaitu melalui (<https://www.kendalkab.go.id/>) yang penggunaannya sedikit berbeda daripada situs web sebelumnya. Mengenai keefektifitas pada situs web yang baru hingga saat ini telah memiliki banyak menu yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Kendal,

sehingga dalam situs web tersebut menyajikan berbagai jenis pelayanan hingga informasi yang dibutuhkan.

Dari penjelasan yang tertera di latar belakang sebelumnya dijelaskan bahwa situs web *Smart City* Kabupaten Kendal dalam hal ini masih dalam tahap peningkatan yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui serta meneliti apa saja upaya atau tindakan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kendal dalam menerapkan *Smart City* Kabupaten Kendal serta apa saja hla-hal yang menjadi penghambat dalam proses penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal. Peneliti melihat terdapat hal menarik terkait dengan keberlangsungan dari penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal yang mana bahwa penerapan dari *Smart City* Kabupaten Kendal dari tahun 2016-2021 sudah sampai sejauh mana terkait dengan penerapan yang telah dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti hendak melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan penulisan latar belakang yang telah tertera sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menerapkan *Smart City* Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 ?.

2. Apa saja yang menjadi penghambat serta kelemahan dalam penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021?.

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana uaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal dalam menerapkan program *Smart City* Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 serta mengetahui hal apa saja yang menjadi penghambat dan kelemahan terkait dengan penerapan program *Smart City* di kabupaten Kendal selama periode Tahun 2016-2021. Kemudian dalam tujuan penelitian ini dapat memberikan pencapaian yang diraih selama pelaksanaan program *Smart City* ini berjalan sehingga pada akhirnya dapat mengetahui proses keberlangsungan dari program *Smart City* Kabupaten Kendal.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini berdasarkan dengan apa yang terjadi berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun diatas diharapkan bisa memberikan informasi serta masukan bagi pemerintah Kabupaten Kendal dan masyarakat sehingga dalam penerapannya ke depan dapat berjalan lebih baik lagi. Serta dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengembangan *Smart City* di kota/daerah lainnya. Adapun dalam merumuskan

manfaat penelitian terdapat dua manfaat yang terdapat didalamnya, diantaranya adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal pada penerapan program *Smart City* Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, sehingga dapat lebih membantu agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Manfaat teoritis sendiri sejatinya dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan mengenai perencanaan sebuah program, serta memberikan pengetahuan penerapan program hingga sampai dengan ke tahap evaluasi.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Manfaat penulis

Adapun manfaat bagi penulis yang di dapatkan adalah mendapat pengetahuan baru dalam hal penerapan *Smart City* itu tersendiri. Artinya sebuah manfaat yang baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam mempelajari hal-hal baru terkait dengan penelitian yang sedang dijalankan. Pengetahuan yang di dapat yaitu seberapa efektif dari upaya Pemerintah dalam menjalankan program *Smart City* dalam membangun Kabupaten Kendal menuju ke arah yang lebih baik.

##### b. Manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Penulis mengharapkan dapat memberikan sebuah hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga dapat mengambil sebuah pengetahuan

yang terdapat di dalamnya. Program *Smart City* diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak atau seluruh warga Kabupaten Kendal dengan lebih baik.

### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah bagian dari penelitian yang berguna sebagai referensi guna untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Adapun hal-hal yang diperlukan pada penelitian terdahulu yaitu konsep yang telah digunakan, pendekatan, dan metode yang digunakan di penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah, Agusti Murni (2017)<sup>5</sup> yang telah melakukan penelitian dengan judul Strategi Pemerintahan Kota Menuju Cilegon *Smart City*. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa rumusan strategi pemerintah Kota Cilegon dalam menuju *Smart City*, diantaranya adalah Strategi penguatan kelembagaan organisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, sandi dan statistika, kemudian Strategi untuk memperkuat kerjasama antar lintas sector dalam penyelenggaraan Cilegon *Smart City*, kemudian strategi untuk mendorong peran dari masyarakat agar dapat berperan aktif dalam rangka untuk mensukseskan Cilegon

---

<sup>5</sup> Agustini Murni. 2017. Strategi Pemerintah Kota Menuju Cilegon *Smart City*. Serang. Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

*Smart City*, terakhir yaitu strategi penguatan kesadaran internal dari dalam organisasi dan masyarakat sebagai bentuk perwujudan Cilegon *Smart City*.

Kedua, Priskadini April (2017)<sup>6</sup> yang telah melakukan penelitian terkait dengan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan *Smart City*. Penelitian ini berjudul Mewujudkan Kota Responsif melalui *Smart City*. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa *Smart City* harus mampu untuk membuat masyarakat bersikap secara aktif terkait dengan aktivitas yang dilakukan, seperti halnya dengan melakukan aktivitas yang nyaman, aman, senang ketika sedang berada ditempat yang mendukung. Pembentukan *Smart City* ini juga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat dengan menerapkan *Smart City* berdasarkan dengan konsep *Smart City* yang digunakan dalam penerapannya sehingga pada akhirnya sebuah konsep *Smart City* yang diterapkan dapat menunjukkan tujuan guna mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah digunakan secara maksimal.

Ketiga, Mujiyono dkk (2016)<sup>7</sup> yang telah melakukan penelitian terkait dengan kesiapan dari pemerintahan Kota Pekalongan dalam menerapkan *Smart City*. Penelitian ini berjudul Kesiapan Kota Pekalongan Menuju *Smart City*. Hasil dari penelitian ini adalah Kota Pekalongan dalam hal persiapan menuju *Smart City* telah melewati beberapa proses dari Konsep *Smart City* sehingga pada akhirnya Kota

---

<sup>6</sup> Priskadini April Insani. 2017. Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City. Dalam Jurnal Unmer. 2(1), 1-

<sup>7</sup> Mujiyono, Siti Nurhayati dkk. 2016. Kesiapan Kota Pekalongan Menuju Smart City. Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan. Vol 11.

Pekalongan siap berproses untuk menuju kota cerdas dengan mempertimbangkan strategi yang dirumuskan seperti halnya kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang menjadi acuan dari pemerintah Kota Pekalongan untuk menuju *Smart City*. Dalam penerapannya Kota Pekalongan telah menerapkan lima dimensi dari total enam dimensi kota cerdas sehingga dalam prosesnya Kota Pekalongan siap menerapkan *Smart City*.

**TABEL 1.1**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode dan Konsep
1.	Agusti Murni (2017) "Strategi Pemerintahan Kota Menuju Cilegon <i>Smart City</i> "	Strategi penguatan kelembagaan organisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, sandi dan statistika, kemudian Strategi untuk memperkuat kerjasama antar lintas sector dalam penyelenggaraan Cilegon <i>Smart City</i> , kemudian strategi untuk mendorong peran dari masyarakat agar dapat berperan aktif dalam rangka untuk mensukseskan Cilegon <i>Smart City</i> , terakhir yaitu strategi penguatan kesadaran internal dari dalam organisasi dan masyarakat sebagai bentuk perwujudan Cilegon <i>Smart City</i> .	Konsep : Manajemen Strategis, <i>Smart City</i> dan Konsep <i>Smart City</i> . Metode : metode yang digunakan adalah metode kualitatif.
2.	Priskadini April Insani (2017) "Mewujudkan Kota Responsif Melalui <i>Smart City</i> "	Pembentukan <i>Smart City</i> ini juga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat dengan menerapkan <i>Smart City</i> berdasarkan dengan konsep <i>Smart City</i> yang	Konsep : <i>Smart City</i> dan Konsep <i>Smart City</i> Metode : Metode yang digunakan

		digunakan dalam penerapannya sehingga pada akhirnya sebuah konsep <i>Smart City</i> yang diterapkan dapat menunjukkan tujuan guna mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah digunakan secara maksimal.	adalah metode kualitatif.
3.	Mujiyo, Siti Nurhayati dkk. (2016) “Kesiapan Kota Pekalongan Menuju <i>Smart City</i> ”	Hasil dari penelitian ini adalah Kota Pekalongan dalam hal persiapan menuju <i>Smart City</i> telah melewati beberapa proses dari Konsep <i>Smart City</i> sehingga pada akhirnya Kota Pekalongan siap berproses untuk menuju kota cerdas dengan mempertimbangkan strategi yang dirumuskan seperti halnya kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang menjadi acuan dari pemerintah Kota Pekalongan untuk menuju <i>Smart City</i> . Dalam penerapannya Kota Pekalongan telah menerapkan lima dimensi dari total enam dimensi kota cerdas sehingga dalam prosesnya Kota Pekalongan siap menerapkan <i>Smart City</i> .	Konsep : Definisi Kota Cerdas dan Konsep Kota Cerdas Metode : Metode yang digunakan adalah studi literature, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), kuesioner.

### 1.6. Kerangka Teori

Setiap proses penelitian yang dilakukan tentu penulis harus memiliki sebuah pola dimana setiap gagasan yang dikeluarkan harus di perkuat oleh teori-teori yang mendukung terkait dengan penelitiannya. Tidak hanya itu, setiap proses yang di lalui teori-teori yang digunakan juga harus bisa untuk di aplikasikan sehingga akan

menciptakan alur yang nantinya akan mudah untuk di pahami. Teori berguna sebagai landasan berpikir bagi peneliti sehingga dalam proses penelitian yang dilakukan memiliki landasan yang benar sesuai dengan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang di teliti. Fungsi teori juga berperan untuk menerangkan, meramal, memprediksi, dan menemukan fakta-fakta secara sistematis. Penulis dalam penelitiannya menggunakan teori yang diantaranya adalah teori Implementasi Kebijakan dan teori *Smart City*.

### **1.7.Implementasi Kebijakan**

Pada setiap proses kebijakan tentu hal yang menentukan kebijakan itu berhasil atau tidak bergantung pada tahap implementasi kebijakannya. Dalam buku Kebijakan Publik yang ditulis oleh Handoyo menunjukkan beberapa pengertian mengenai implementasi kebijakan yang dapat diambil seperti halnya menurut Ponto, dkk (2016) “Implementasi kebijakan publik menenkankan pada tindakan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu, kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukandalam keputusan kebijakan. Kemudian pengertian menurut Usman (2002) “Implementasi bermuara pada sebuah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem yang bukan hanya sekedar aktivitas tetapi sebuah tindakan yang terencana dan untuk mencapai sebuah tujuan”. Dalam penelitian ini teori implementasi yang gunakan yaitu pada teori model implementasi yang dikemukakan oleh David C. Korten (Akib&Tarigan, 2008) menyebutkan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Yaitu

kesesuaian antara apa yang di tawarkan oleh program dengan apa yang di butuhkan oleh kelompok sasaran. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang di isyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk memperoleh hasil program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Pada dasarnya dalam hal ini implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi ketiga kriteria yang telah disebutkan diatas. Ketiga kriteria tersebut menjadi sebuah acuan yang dapat digunakan untuk mengukur pada penerapan kebijakan melalui implementasi kebijakan. Seperti halnya pengertian implementasi kebijakan menurut Mufizz yang dikuti dalam buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)” menjelaskan bahwasannya implementasi kebijakan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kemudian terdapat model implementasi kebijakan yang memiliki sifat *top-down* (atas-bawah) yang dikenalkan oleh George C Edward III yang memiliki 4 variabel yang menjadi titik tentu sebuah implementasi dapat dikatakan berhasil dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan empat variable yang ada, diantaranya adalah :

a. Komunikasi

Komunikasi dalam hal implementasi kebijakan menjadi variable yang penting yang digunakan untuk mempengaruhi proses dari implementasi kebijakan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat ditentukan dengan adanya komunikasi yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam variable komunikasi terdapat 3 hal yang menjadi induk dari sebuah komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan yang diantaranya adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi dalam hal ini adalah aliran komunikasi yang baik dapat menghasilkan sebuah implementasi yang baik pula sehingga dalam hal ini dapat mengurangi salah paham atau salah penyampaian komunikasi diantara pemegang kekuasaan. Berikutnya kejelasan yang berarti bahwa seluruh informasi yang mengalir harus bersifat jelas sehingga dalam proses implementasi kebijakan yang dijalankan tidak memiliki makna yang ambigu atau tidak jelas yang bisa mengakibatkan timbulnya masalah yang serius. Terakhir konsistensi yang berarti harus memiliki konsistensi dalam hal komunikasi yang jelas tidak berbelok-belok yang dapat membuat sebuah pesan tidak tersampaikan dengan jelas.

b. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting pula dalam implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan pengelompokan sumber daya menjadi hal penting yang harus dilakukan sehingga dalam pembagian porsi tugas tidak berat sebelah atau sesuai dengan kemampuan masing-masing.

c. Disposisi

Disposisi menjadi faktor penting yang mempunyai konsekuensi bagi implementasi kebijakan. Hal ini diibaratkan ketika pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif dalam implementasi kebijakan maka akan memberi dampak yang positif pula bagi implementasi kebijakan, begitupun apabila sebaliknya ketika pelaksana memiliki kecenderungan negative akan berdampak buruk bagi keberlangsungan implementasi kebijakan.

d. Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi dalam struktur pemerinthan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Birokrasi dalam hal ini menjadi faktor penting untuk keberlangsungan implementasi kebijakan yang menjadi inti. Penerapan SOP (*Standart Operational Procedure*) menjadi hal penting agar para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang

dimiliki dan dapat menyeragamkan seluruh tindakan pelaksana sehingga dalam menimbulkan fleksibilitas yang besar.

### ***1.6.2 Smart City***

Secara sederhana *Smart City* dapat diartikan sebagai kota pintar atau kota cerdas yang memberikan penwaran peningkatan kualitas hidup untuk masyarakat. *Smart City* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah konsep pembuatan rencana, penataan, dan pengelolaan terhadap sebuah kota yang menerapkan *Smart City* dimana didalamnya seluruh aspek yang tersirat didalam kehidupan saling terintegrasi. Dalam buku yang ditulis oleh Edi Surya Negara dengan judul “*Smart Government*” menjelaskan beberapa pendapat mengenai *Smart City* yang diantaranya adalah menurut Guido Perbiola bahwasannya *Smart City* merupakan bagian dari beberapa aspek yang dalam penggunaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung adanya sistem yang lebih efisien sehingga dapat saling terhubung antar satu sama lain dalam kehidupan sehari. Sedangkan menurut Washburn D menjelaskan bahwa *Smart City* merupakan sebuah cara untuk menggabungkan setiap komponen penting dari suatu infrastruktur serta layanan yang ada dalam kota seperti halnya pendidikan, keselamatan publik, transportasi, administrasi, serta keperluan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa *Smart City* menjadi sebuah bagian yang akan terus berdampingan dengan kehidupan manusia sebagaimana akan terus berkembang untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Penerapan *Smart City* yang

dilakukan pun akan terus menunjukkan sebuah terobosan baru yang akan terus berkembang menunjukkan eksistensinya. Adapun tujuan dari *Smart City* adalah untuk memberikan sebuah fasilitas dan kondisi dimana *Smart City* memberikan sebuah kondisi yang nyaman, aman, tentram, serta memiliki kekuatan ekonomi dan daya saing tersendiri. Sebagaimana pendapat dari Rudolf Giffinger dalam tulisannya mengenai *Smart City* di sejumlah kota besar di eropa yang dikutip dalam buku “*Smart Government*” dijelaskan bahwa *Smart City* memiliki enam karakteristik yang menjadi dimensi yang menggambarkan kemampuan *Smart City* dalam mengelola potensi yang ada didalamnya. Dijelaskan enam karakteristik yang dimaksud sebagai berikut :

*a. Smart Government*

Hal yang menjadi kunci dari keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan memberikan yang terbaik serta melakukan proses penyelenggaraan dan proses pembangunan pemerintahan yang menganut pada sistem prinsip kemanusiaan dan prinsip demokrasi didalamnya. Dalam hal ini harus memiliki sebuah komitmen yang teguh serta prinsip yang baik sehingga akan tercipta pemerintah yang bersih, bertanggungjawab, serta memberikan daya saing tersendiri. Diharapkan juga mampu memberikan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dalam penerapan *Smart City* yang

dalam keberlangsungannya akan memerlukan kerjasama yang baik untuk semua pemerintah serta untuk masyarakat terutama.

*b. Smart Economy*

Dalam hal ini inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing untuk meningkatkan kualitas atas penerapan *Smart City*. Tingginya inovasi yang telah diciptakan akan menciptakan sebuah peluang usaha baru yang mampu mendongkrak daya saing tersendiri sehingga dapat menjadi sebuah salah satu tempat kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. layaknya program pemberdayaan masyarakat seperti UMKM dan Koperasi juga mendorong inovasi dan mengantisipasi adanya persaingan usaha. Serta dapat mengembangkan jiwa dalam berwirausaha.

*c. Smart People*

Dengan menanamkan nilai-nilai edukasi di dalam masyarakat dapat mendorong kehidupan sosial di perkotaan menjadi kondusif. Diantaranya dengan adanya kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi, saling menerima, dan saling berkolaborasi di dalam kehidupan bersosial. Nilai-nilai ini perlu dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat.

*d. Smart Mobility*

Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan transportasi dan infrastruktur. Sehingga pada sector transportasi dapat lebih maju

sehingga dalam pelaksanaannya lebih efisien. Dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

*e. Smart Environment*

Hal ini perlu memerhatikan penggunaan dan pembangunan harus selalu memperhatikan dampak pada lingkungan sekitar sehingga tidak akan menyebabkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam juga harus perlu di perhatikan karena dengan pemanfaatan lingkungan yang baik dan benar akan memberika banyak manfaat. Serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk memberikan lingkungan yang bersih dan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai salah satu penerapan lingkungan pintar.

*f. Smart Living*

Hal yang perlu diperhatikan adalah kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakatnya, lalu dapat terwujudnya lingkungan yang kondusif dan berkualitas.

## 1.8. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) menjelaskan mengenai kerangka berpikir adalah sebuah model yang secara konseptual membahas mengenai bagaimana teori yang digunakan dapat berhubungan di antara satu sama lain. Artinya adalah teori-teori yang telah digunakan dapat berpengaruh terhadap seluruh faktor yang ada dalam penelitian sehingga dapat menjadi sebuah masalah yang penting untuk di teliti. Pembahasan mengenai program *Smart City* di Kabupaten Kendal dilakukan karena pelaksanaan pada program ini belum jelas. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pelaksanaan yang dilakukan belum tepat sasaran dan secara konsep sudah baik namun setelah di limpahkan ke lapangan masih belum jelas terkait dengan pelaksanaannya.

mengenai *Smart City* dapat menjadi batu loncatan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal guna melakukan inovasi program,. Dalam merumuskan program *Smart City* Pemerintah telah melakukan pembuatan program yang baik. Namun perlu diketahui bahwasanya dalam implementasi program yang dilakukan masih belum jelas dan bisa dikatakan hanya sebagai memenuhi tanggungjawab saja. Proses implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal diantaranya adalah pembuatan situs web yang berisi mengenai informasi umum dan pelayanan publik yang beragam, namun di dalamnya hanya berisi mengenai informasi umum yang tidak terupdate dan bagian pelayanan publik belum optimal untuk bisa di gunakan.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **1.9. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang sedang diamati (Bogdan & Taylor 1992:21). Maka dari itu dimungkinkan memperoleh pemahaman kenyataan yang sedang terjadi melalui proses berpikir induktif.

### **1.9.1 Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian yang akan digunakan adalah diantaranya adalah Pemerintahan Kabupaten Kendal & Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dikarenakan dalam penelitian ini untuk mendapat data dari dinas terkait. Oleh karena itu untuk memperoleh data penelitian akan dilaksanakan di wilayah administrasi Kabupaten Kendal. Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti juga memperhatikan berbagai aspek yang ada. Artinya dalam pelaksanaan program *Smart City* ini pihak-pihak mana saja yang bertanggungjawab atas keberlangsungan program tersebut.

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan orang yang diminta untuk memberikan keterangan mengenai fakta dan pendapat. Menurut Arikunto (2006:145) subjek penelitian adalah subjek yang di tuju untuk di teliti oleh peneliti. Artinya adalah subjek penelitian adalah sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta yang di cari sehingga akan membetuk sebuah gagasan baru. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan program *Smart City* diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Kendal dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tersebut serta masyarakat sebagai pengguna program publik. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pelaksana program sehingga berperan penuh akan

keberlangsungan program yang telah di tetapkan sehingga akan mempermudah peneliti dalam menjalankan penelitian. Kemudian masyarakat sebagai pemanfaat dalam program ini juga memiliki peran yang sangat penting. Sebagai pengguna atau yang berperan dalam implementasi program *Smart City*, masyarakat tentu akan sangat berperan sehingga akan diketahui terkait dengan perkembangan program ini apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Dalam hal ini subjek penelitian untuk mendukung data yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga sumber informasi yang dibutuhkan peneliti diantaranya adalah :

1. Sekretaris Daerah : Bapak. Ir. Sugiono, M.T.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika : Bapak. Wiwit Andariyono, S.STP.
3. Ketua Bidang Aplikasi Informatika : Bapak. Ahmad Syahrul Falah, S.Kom, MM.

### **1.9.3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data di dapat serta memiliki informasi yang dapat digunakan. Pengertian sumber data menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) adalah subjek dari mana di peroleh. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:142) sumber data adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat. Dalam melakukan sebuah penelitian maka pemahaman mengenai berbagai sumber data merupakan bagian yang amat penting

bagi peneliti. Karena hal itu maka dalam mencari sumber data diperlukan kedalaman, ketepatan, dan kelayakan dari informasi yang diperoleh. Oleh sebab itu sumber data yang akan di ambil oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder.

### **1.9.3.1 Data Primer**

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok. Sumber data primer adalah sumber data yang berisi data utama. Data utama yang di peroleh adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dengan cara wawancara dengan narasumber dan hasil dari observasi selama peneliti melakukan penelitian.

### **1.9.3.2 Data Sekunder**

Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul dalam bentuk table atau diagram. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:143) data sekunder adalah sumber data penelitian yang di dapat melalui media perantara. Artinya data sekunder adalah sumber data tambahan yang diambil dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain. Adapun sumber dari data primer adalah berupa Buku, Dokumen, Foto, Statistik, Penelitian Sebelumnya dan lainnya.

## **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2007: 309) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah). Teknik pengumpulan data lebih banyak berperan pada partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan metode penelitian kualitatif deskriptif maka dalam teknik pengumpulan data sangat perlu untuk dapat menemukan data yang dikehendaki serta agar bersifat valid. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa macam cara seperti berikut:

### **1.8.4.1 Wawancara**

Menurut Djaman Satori (2007:44) wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pewawancara mengajukan pertanyaan terkait dengan tema yang diusung dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Nantinya dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan sangat memberikan keleluasaan kepada para informan dalam menjawab semua pertanyaan yang akan diberikan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan judul dan informasi yang telah di peroleh.

### **1.8.4.2. Studi Dokumen**

Studi dokumen menjadi salah satu Teknik pengumpulan data yang bersumber dari manusia. Menurut Djaman Satori (2007:93) studi dokumen merupakan usaha

untuk memperoleh informasi melalui dokumen-dokumen. Lalu untuk memperdalam dan memperjelas data yang akan diambil maka perlu untuk melakukan studi dokumen yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait. Dalam hal ini nantinya peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis berupa buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan dan lainnya.

### **1.9.5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dalam proses analisis data akan berlangsung dari sebelum peneliti terjun langsung lapangan hingga kemudian berada langsung di lapangan sampai setelah dari lapangan. Sehingga nantinya penelitian ini akan terus berlanjut sampai hasil penulisan penelitian. Lalu untuk melakukan analisis data maka hal yang perlu dilakukan adalah:

#### **1.9.5.1. Reduksi Data (*reduction data*)**

Pada tahap ini atau tahap reduksi data merupakan langkah awal yang harus dilalui oleh peneliti dalam menganalisa data dalam penelitian ini. Tujuan dari reduksi data yaitu untuk mempermudah peneliti untuk memahami data yang telah dikumpulkan dengan cara merangkum, lalu memilah hal-hal apa saja yang menjadi pokok dan penting, lalu diklasifikasikan sesuai focus penelitian.

#### **1.9.5.2. Penyajian Data (*Display Data*)**

Tahap kedua yang perlu dilakukan adalah penyajian data, ini merupakan tahapan untuk menganalisa data dalam penelitian ini. Proses penyajian data yang harus dilakukan oleh peneliti harus disajikan secara jelas dan singkat agar memudahkan dalam memahami permasalahan yang ada.

#### **1.9.6 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)**

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, ini menjadi unsur penting yang harus dilakukan dalam teknik analisis data. Dalam pembuatan kesimpulan ini maka penting untuk dipelajari dan dalam pembuatannya harus mudah dipahami oleh diri sendiri maupun untuk orang lain.